



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana Badan dan Ketua Dewan Pengawas Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 2 Oktober 2023
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023 dan Pembahasan RKP Tahun 2024
Ketua Rapat	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Agus Widijatmoko, S.H.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Kepala Pelaksana BPKH; 3. Ketua Dewan Pengawas BPKH; 5. Jajaran BPKH.

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi oleh Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

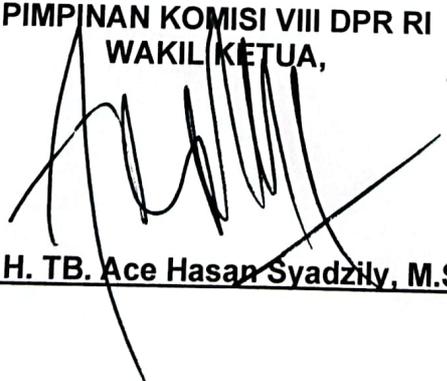
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ketua Dewan Pengawas membahas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran dan Program Tahun 2024, disimpulkan:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penjelasan rencana strategis BPKH periode 2022-2027 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) anggaran biaya operasional BPKH Tahun 2023 sebesar Rp476.084.419.674,- (*Empat Ratus Tujuh Enam Miliar Delapan Puluh Empat Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) serta anggaran alokasi rekening virtual jemaah haji tahun 2024 sebesar Rp2.300.000.000.000,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Miliar rupiah*). Selanjutnya akan dilakukan pendalaman pembahasan bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan realisasi program kemaslahatan untuk kepentingan umat Islam.
  - b. Memastikan capaian proyeksi target pengelolaan keuangan haji tahun berjalan.
  - c. Meningkatkan sinkronisasi laporan keuangan operasional haji dengan Kementerian Agama RI.
  - d. Meningkatkan sinergi Badan Pelaksana BPKH dengan Dewan Pengawas BPKH untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Haji Terpercaya.
  - e. Mengkaji potensi instrumen yang dapat dimasukkan ke portofolio investasi bernilai manfaat yang lebih besar.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

  
**Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si**